

Demokrasi Pancasila

Aprilyautami¹ Viola Safitri² Azrina Febriyani Nasution³ Karin Vazira⁴

Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.^{1,2,3,4}

Email: apriyautami052@gmail.com¹ viola080123102@uinsu.ac.id²
azrina0801231033@uinsu.ac.id³ karin.vazira@gmail.com⁴

Abstrak

Ideologi dan asas Pancasila sebagai sistem demokrasi sudah ada di Indonesia sejak lama, dan jika ingin menjadi negara ideal maka dalam pelaksanaannya harus berlandaskan demokrasi. Diketahui bahwa Pancasila merupakan landasan demokrasi pemerintahan Indonesia. Pancasila memang menawarkan demokrasi yang ideal dan sejati. Hanya Pancasila sebagai ideologi negara selama 70 tahun dan juga sebagai pilar demokrasi, dengan adanya perubahan politik di negeri ini ternyata berbeda tampilannya. Mengapa demokrasi selalu menjadi isu dan pilihan moral dalam perjuangan politik? Karena masyarakat sadar dirinya mempunyai kelemahan moral kecenderungan untuk mengontrol dan mendominasi orang lain. Jika Kecenderungan ini melekat pada diri seseorang yang kebetulan mempunyai kekuasaan, dan tidak ada mekanisme kendali untuk memperingatkan dan mengendalikannya, sehingga Biasanya masyarakatlah yang menjadi korbannya.

Kata Kunci: Demokrasi, Demokrasi Pancasila, Landasan Negara



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perdebatan tentang makna Pancasila dengan segala nilai-nilainya dalam konteks bangsa dan kehidupan berbangsa banyak dibicarakan di berbagai forum belakangan ini. Kenyataan tersebut rupanya disebabkan oleh berbagai peristiwa di Indonesia yang secara jelas menunjukkan betapa masyarakat republik ini telah kehilangan semangat Pancasila. Berbagai fenomena kekerasan dan tindakan tidak tertib yang terjadi di masyarakat Indonesia, hingga taraf tertentu seringkali berujung pada kematian, menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang diusung Pancasila sudah tidak lagi menjadi etos hidup mereka. Indonesia berhasil demokrasi sebagai suatu sistem politik, masyarakat bebas mengutarakan pendapatnya dan menjadi terorganisir dan orang-orang juga memilih langsung atau pilih sendiri Pengelola Teh diperbolehkan calon independen atau perseorangan keluar dari jalur politik untuk mencalonkan diri dalam pemilihan pimpinan provinsi (diejek) membantu menghidupkan kehidupan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi membantu meningkatkan partisipasi politik hadirin Masyarakat bisa mengatur diri Anda untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat atau orang kembali mengalami kebebasan sipil dan politiknya. Orang-orang menikmati kebebasan pendapat dan orang-orang menikmatinya kebebasan berserikat. Kebebasan sebaliknya warga sipil dapat menikmatinya hak sekelompok orang bisa kelompok masyarakat menghapus lain Dalam keadaan seperti ini, beberapa kelompok mengevaluasi pelaksanaan demokrasi Pasti ramai di Indonesia ideologi atau dasar negara republik Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagaimana mestinya menjadi landasan atau ideologi negara diterapkan dalam kehidupan demokratis. Setiap negara implementasi demokrasi tentu saja tidak meskipun menghormati hak asasi manusia seorang pria Di negara demokratis kebebasan rakyat sangat dihormati, tapi kebebasan apa? Tentu saja kebebasan yang bertanggung jawab. Kita tidak bisa menerapkan demokrasi kaum liberal yang mendukung kebebasan tentu saja individu mengakibatkan

sekularisme dan kapitalisme Kita juga tidak bisa menerapkan demokrasi proletar diterima oleh negara-negara sosialis seorang komunis Negara kita menerapkannya Demokrasi Pancasila dimana ada demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Demokrasi di Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kebebasan dalam menjalankan kebebasan pers, kebebasan masyarakat untuk berkeyakinan, berbicara, berkumpul, mengemukakan pendapat, mengkritik bahkan mengontrol kegiatan pemerintah. Namun hal ini tidak berarti bahwa demokrasi saat ini berjalan dengan sempurna di Indonesia. Masih banyak permasalahan yang muncul ketika pemerintah gagal menjamin sepenuhnya kebebasan warga negaranya, seperti meningkatnya angka pengangguran, kemacetan lalu lintas di jalan raya, meningkatnya banjir dan masalah korupsi. Dalam kehidupan politik di negara mana pun, kebebasan politik adalah hal yang tidak bisa dielakkan, sering kali dinikmati, namun tidak semua kebebasan politik berjalan sesuai keinginan, karena pada hakikatnya semua sistem politik mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Demokrasi adalah sebuah proses yang berkelanjutan, sebuah gagasan dinamis yang berkaitan erat dengan perubahan. Apabila suatu negara dapat sepenuhnya melaksanakan kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan, maka negara tersebut dapat berhasil menerapkan sistem demokrasi. Sebaliknya jika suatu negara tidak menggunakan sistem pemerintahan demokratis, maka negara tersebut adalah negara. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokratis, kita harus terus menjaga, meningkatkan, dan melengkapi ciri-ciri demokrasi yang sudah ada. Untuk mencapai kesejahteraan, cita-cita demokrasi yang sejati akan membawa Indonesia menuju keadaan perubahan. Mengenai topik "Demokrasi" sebenarnya kami ingin mengangkat topik tersebut Orang Indonesia, namun kami lebih memilih mata pelajaran yang lebih sederhana dan cakupannya lebih kecil karena kami menyadari keterbatasan kami.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang mengacu pada sila keempat Pancasila yang secara filosofis penting. Demokrasi berdasarkan pada: Demokrasi berpedoman pada kebijaksanaan musyawarah dan perwakilan. Persatuan Indonesia yang diliputi keadilan, kemanusiaan dan beradab, dijiwai dengan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan keadilan sosial kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sebab, setiap sila dalam Pancasila bersumber dari atas dan asas di bawah. Jelas terlihat bahwa demokrasi Pancasila sangat berbeda dengan demokrasi yang berkembang di Barat, terutama pada tataran implementasinya. Kalau kita lihat demokrasi model Barat lebih bersifat kuantitatif dan mayoritas adalah rakyat yang adil, baik, dan jaya, sedangkan demokrasi Pancasila lebih mengutamakan kualitas (musyawarah dan mufakat), dapat dicapai dengan suara (kuantitatif) jika tidak ada pertimbangan lebih lanjut yang diberikan. Lebih lanjut, dalam demokrasi Pancasila tidak ada ruang bagi oposisi karena berdasarkan paradigma bahwa pemerintah, negara, dan rakyat merupakan satu kesatuan, sedangkan dalam demokrasi liberal (Barat) diberi tempat oposisi masu. Paradigma dimana rakyat dan pemerintah/negara merupakan dua entitas yang saling bertentangan dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri.

Hakikat Pancasila adalah mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan yang religius (humanisme-religius) dan bukan pada kemanusiaan yang sekuler, sehingga ukuran kebenaran yang dijadikan landasan kebijakan adalah tidak hanya rasional, tetapi juga religius. Pada prinsipnya demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana rakyat ikut serta dalam penyelenggaraan negara. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berakar pada watak dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang pelaksanaannya dituangkan dalam Pembukaan dan UUD 1945. Dasar Demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat (Ayat 1 Pasal 2 UUD 1945), asas demokrasi Pancasila merupakan sila keempat Pancasila. Dalam konteks kebebasan individu dalam demokrasi Pancasila, kebebasan tersebut bukan sekedar kebebasan, namun

harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab atas pelaksanaan kebebasan tersebut. Hal ini merupakan ciri demokrasi Pancasila, yang tanggung jawabnya tidak hanya bersifat horizontal (terhadap sesama manusia) tetapi juga bersifat vertikal (terhadap Sang Pencipta) yang dapat diartikan humanis dan religius. Demikian pula, meskipun perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi Pancasila, namun penyelesaiannya harus mengacu pada sila ketiga persatuan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi Pancasila

Demokrasi terdiri dari kata “demos” (rakyat) dan “kratein” (memerintah) (artia berarti pemerintahan) dan secara teori umumnya diartikan sebagai pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat. Namun pemahaman klasik tersebut telah berubah, terutama setelah Perang Dunia II, ketika muncul negara-negara baru yang menamakan dirinya demokrasi, padahal menurut standar umum mereka bukan negara demokrasi, hal ini ditinggalkan oleh Masyarakat sebagai analisis gagasan tentang konsep demokrasi., bahkan mungkin ada satu negara totaliter yang diktatorik. Misalnya, sebelum reformasi besar-besaran pada tahun 1990-an, semua negara di Jerman Timur, yang dikenal dengan Republik Demokratik Jerman, menegaskan demokrasi dengan menekankan rakyat sebagai pusat kehidupan politik. Namun kenyataannya, hanya ada satu partai politik yang berkuasa tanpa ada unsur persaingan. Pada dasarnya, hanya sekelompok kecil elit yang menguasai partai politik yang benar-benar menikmati kekuasaan, sementara mayoritas warga negara menikmati hak-hak dasar seperti hak berekspresi, hak berserikat dan berkumpul, serta hak atas pers yang bebas dan independen. Apa yang kita lihat di Eropa Timur juga terlihat di Tiongkok, Vietnam, dan sebagian besar negara lain di Amerika Latin dan Afrika.

Meskipun semua negara tersebut mengklaim diri sebagai negara demokrasi, namun demokrasi Pancasila tetap dianut. Kata “demokrasi” pada satu sisi merupakan predikat yang memberi kesan baik pada proses interaksi kekuasaan negara (struktur suprapolitik) dalam menentukan kebijakan umum berupa keputusan politik. Dengan demikian, konsep demokrasi dimulai di Eropa Barat dan semakin berkembang dengan berbagai variasi konsep demokrasi, yang kemudian menjadi penyebab meningkatnya ketegangan dunia mengenai kehidupan kolektif, khususnya bernegara. Untuk itu UNESCO sedang berupaya menerbitkan buku bertajuk “Ilmu Politik Modern” yang mampu memberikan informasi mengenai berbagai konsep tersebut, dengan harapan dapat mengurangi ketegangan yang timbul dari perbedaan-perbedaan yang ada. Buku ini menyoroti perbedaan pengetahuan nasional antar negara yang diteliti, hal ini disebabkan adanya perbedaan persepsi yang timbul dari gaya hidup masing-masing negara, sehingga persoalan ideologi menjadi relevan. Demokrasi mempunyai banyak arti karena demokrasi mempunyai interpretasi. Setiap penguasa suatu negara berhak menyatakan negaranya demokratis, meskipun nilai-nilai yang dianutnya atau praktik politik kekuasaannya jauh dari prinsip dasar demokrasi. Demokrasi langsung adalah negara di mana semua warga negara benar-benar berpartisipasi dalam musyawarah untuk menentukan kebijakan umum dan hukum, seperti yang dipraktikkan di Yunani kuno.

Pada tahun diterapkan demokrasi tidak langsung berdasarkan sistem perwakilan. Demokrasi yang ideal diwujudkan pada tahapan yang berbeda melalui konstitusi yang berbeda. Demokrasi langsung merupakan demokrasi yang derajat relatifnya paling tinggi. Demokrasi langsung ditandai dengan pembentukan undang-undang (UU) dan fungsi eksekutif dan yudikatif yang paling penting, yang disetujui oleh rakyat di parlemen yang besar. Atau rapat umum akan diadakan. Organisasi semacam itu hanya dapat didirikan di Masyarakat, di komunitas kecil dan dalam kondisi sosial sederhana, di negara-negara demokrasi langsung,

seperti di suku-suku Jermanik dan Romawi kuno, prinsip-prinsip demokrasi sangat terbatas. Tidak semua warga negara berhak ikut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan Majelis Rakyat. Anak-anak, perempuan, dan budak (di mana terdapat perbudakan) tidak memiliki hak politik. Saat ini, konstitusi di beberapa wilayah kecil di Swiss (4.444) mempunyai karakter demokrasi langsung. Aristoteles dipandang oleh para demonstran dan masyarakat umum sebagai pendukung pemerintahan (Kratos).

Namun, Plato mengkritik pandangan ini dengan mengatakan bahwa sistem demokrasi mengabaikan 4.444 orang terpelajar. Platon menyukai pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok kecil penguasa dengan persetujuan banyak orang. Kelompok kecil yang berkuasa berpikir bahwa mereka harus pintar, terpelajar, dan kaya. Di negara-kota Athena, yang diperintah oleh gubernur, tidak ada perbedaan antara negara bagian dan masyarakat. Warga negara mempunyai fungsi dan merupakan subjek kekuasaan politik dan pencipta peraturan dan perundang-undangan. Rakyat (Demo) terlibat langsung dalam urusan kenegaraan serta berfungsinya peraturan perundang-undangan dan peradilan. Persyaratan utama sistem ini mencakup komitmen terhadap prinsip-prinsip kebajikan sipil, yaitu dedikasi terhadap negara-kota republik dan subordinasi kehidupan pribadi pada kepentingan publik dan komunitas. Warga negara dapat memenuhi kebutuhannya dan hidup terhormat hanya dengan mengikuti kebijakan. Kelemahan sistem ini adalah masih adanya masyarakat yang terpinggirkan, seperti perempuan dan budak. Sistem ini diperkenalkan karena meskipun kita hidup dalam masyarakat di mana orang dapat bertemu langsung, namun budaya berbicara (bukan budaya menulis) tetap ada. Namun model ini mengalami kemunduran. Alasan utamanya adalah Kelsen, Hans, Teori Hukum Murni (Jakarta: Limdi Pers, 1995).

Penurunan ini juga terlihat karena nilai-nilai sipil yang seharusnya menjadi landasan sistem ternyata sangat mudah dimanipulasi dan hanya bergantung pada partisipasi salah satu kelompok besar pada saat itu. Artinya, rakyat bergantung pada aristokrasi atau monarki. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, serta mengandung unsur kesadaran beragama, kebenaran, cinta kasih, akhlak mulia, dan budi pekerti. Indonesia dan Berkelanjutan. Dalam demokrasi Pancasila, penyelenggaraan negara diselenggarakan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat. Kebebasan pribadi dalam demokrasi Pancasila tidak bersifat mutlak, namun harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Universalitas cita-cita demokrasi terikat pada cita-cita hidup bangsa Indonesia, dijiwai semangat kekeluargaan, dan tidak mengenal aturan mayoritas dan minoritas. Kehidupan bernegara, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, kemasyarakatan seluruh warga negara Republik Indonesia Organisasi kekuasaan politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan lainnya, dan lembaga negara yang terpusat dan sentral di daerah.

Implementasi Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah suatu sistem pemerintahan yang berpedoman pada politik melalui proses permusyawaratan dan perwakilan yang berlandaskan ketuhanan dan kemanusiaan, serta berkeadilan dan beradab. Penerapan demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan sebagai upaya untuk mencegah perpecahan yang dapat merugikan negara. Penerapan Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, memuat nilai-nilai luhur mengenai ketuhanan, agama, keadilan, dan kenegaraan. Di bawah ini contoh penerapan sila pertama demokrasi Pancasila. Kami menghormati segala perbedaan keyakinan yang berbeda. Meningkatkan keharmonisan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Jangan memaksakan keyakinan atau agamamu pada orang lain. Mendorong sikap saling toleransi antar umat beragama.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Prinsip kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mencakup pentingnya menghargai orang lain, meskipun terdapat perbedaan agama di semua masyarakat Masu. Di bawah ini contoh penerapan sila kedua demokrasi Pancasila. Menanamkan dan menerapkan rasa toleransi terhadap orang lain. Nilai-nilai dan rasa hormat antar masyarakat. Senantiasa bersikap adil kepada semua orang tanpa membedakan. Menghargai perbedaan pendapat. Menghormati harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sederajat. Menanamkan rasa nasionalisme dan komitmen terhadap eksistensi bangsa.
3. Persatuan Indonesia Selanjutnya sila ketiga adalah unifikasi Indonesia. Masyarakat Indonesia diharapkan lebih mengutamakan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keamanan bangsa dan negara dibandingkan kelompok dan perseorangan. Di bawah ini contoh penerapan sila ketiga demokrasi Pancasila. Maksudnya, menghidupkan kembali segala perbedaan yang ada dan menjamin agar perbedaan tersebut berujung pada persatuan atas dasar *Binneka Tunggal Ika*. Mewujudkan suasana gotong royong dalam segala perbedaan sehingga dapat tercipta kehidupan harmonis dalam masyarakat Indonesia. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjaga keutuhan dan keutuhan bangsa Indonesia.
4. Demokrasi yang berpedoman pada kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Sila keempat adalah demokrasi yang dipandu oleh kebijaksanaan dan konsensus. Demokrasi muncul dari pengakuan bahwa manusia mempunyai kedudukan, hak, dan tanggung jawab yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Di bawah ini contoh penerapan sila keempat demokrasi Pancasila: "Menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah untuk mufakat." Menerima dan mempertimbangkan pendapat orang lain. Menerima dan mengevaluasi konsekuensi keputusan yang disarankan. Implementasi hasil keputusan rekomendasi.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah masyarakat Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, artinya. Di bawah ini adalah contoh pelaksanaan sila kelima demokrasi Pancasila. Hal tersebut untuk menumbuhkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong di seluruh masyarakat Indonesia. Kita akan sadar akan perilaku adil terhadap orang lain, melindungi hak dan kewajiban kita, dan menghormati martabat orang lain. Agar hidup rukun dan damai, marilah kita tumbuhkan semangat gotong royong. Untuk mengenal gerakan menuju terwujudnya demokrasi Pancasila, kami akan memperkenalkan beberapa konsep kedaulatan rakyat, sistem republik, sistem perwakilan, negara hukum, pemerintahan konstitusional, hak asasi manusia dan kewajiban, lembaga negara demokratis, sistem wajib, dll. Indikator dapat digunakan. Sistem konservatif (demokrasi), dan tujuan demokrasi.

Berikut ini penjelasan pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia. Undang-Undang Dasar Tidak Tertulis Gerakan penerapan demokrasi Pancasila merupakan gerakan dinamis yang melahirkan Undang-Undang Dasar tidak tertulis yang memungkinkan adanya UUD 1945. Demokrasi Pancasila 1945, sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945, "Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan merupakan cita hukum yang mengatur hukum-hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis." Konstitusi Konstitusi, Gerakan Nasional Hal ini didasarkan tentang Propenas yang diusulkan Presiden sebagai rencana kerja, dan menjadi UU Propenas setelah mendapat persetujuan DPR. Dengan demikian, masyarakat menerima seperangkat peraturan perundang-undangan Propenas sebagai mekanisme dinamis pelaksanaan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila semata-

mata soal pengambilan keputusan nasional. Sering diungkapkan bahwa meskipun pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak disebut demokrasi liberal, demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Dalam sistem demokrasi Pancasila, pembentukan dialog diatur dalam Pasal 3 UUD 1945. Artinya, "Dengan mempertimbangkan tren yang ada di masyarakat, setiap lima tahun Kongres harus mencatat segala sesuatu yang terjadi pada saat itu dan arah yang harus diambil di masa depan berdasarkan dinamika sosial, segala sesuatu yang terjadi. Dari seluruh kecenderungan yang ada, kita dapat mengambil beberapa arahan. Penerapan Demokrasi Pancasila Menunjukkan adanya gerakan yang menyerukan penerapan Demokrasi Pancasila yang menggabungkan ideologi dan menyarankan sebaiknya dilakukan dalam kompleksitas kehidupan manusia. Hidup tidak ada perubahan nilai. Oleh karena itu, sangat penting untuk merumuskan makna demokrasi Pancasila dan menjamin penerapannya secara baik dan tepat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.


Pemilihan Umum sebagai Wujud Demokrasi Pancasila

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sistem pemilihan pejabat publik yang banyak diterapkan di negara-negara dengan sistem pemerintahan demokratis. Dalam buku karya Titik Triulan, "Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945" (2010), memandang pemilu sebagai simbol dan ukuran demokrasi. Demokrasi dengan pemilu dianggap sebagai suatu sistem yang menjamin kebebasan nasional yang dicapai melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi masyarakat secara luas. Dalam negara demokrasi Pancasila, seperti halnya di Indonesia, pemilu merupakan sarana untuk menegakkan kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Merupakan tugas pemerintahan demokratis untuk menyelenggarakan pemilihan umum pada waktu yang telah ditentukan. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia didasarkan pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: "...kemerdekaan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia" Indonesia. "dalam susunan Negara Kedaulatan Negara Republik Indonesia..." Pasal 2 Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: "Kedaulatan ada di tangan rakyat" Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melaporkan bahwa pemilu di Indonesia diselenggarakan secara langsung. Tempat dimana rakyat memilih wakilnya pada lembaga perwakilan rakyat. Contoh: Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD I, DPRD II, DPD.





Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung artinya rakyat memilih langsung wakil-wakilnya menurut hati nuraninya. Pada prinsipnya semua warga negara yang memenuhi syarat memilih mempunyai hak untuk ikut serta dalam pemilu. Kebebasan berarti bahwa semua warga negara mempunyai kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri tanpa tekanan atau paksaan orang lain. Sebaliknya, kerahasiaan berarti ketika pemilih memberikan suaranya, datanya terjamin kerahasiaannya dan tidak diketahui oleh partai politik mana pun. Sementara itu, pentingnya kejujuran menekankan bahwa pejabat pemerintah, peserta pemilu, pengawas, pemantau, dan seluruh partai politik harus bertindak jujur dalam setiap pemilu. Asas keadilan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, peserta dan pemilih mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Idealnya, pemilihan umum dimaksudkan untuk menjamin peralihan kekuasaan dalam pemerintahan dilakukan secara tertib dan damai sesuai mekanisme yang dijamin oleh konstitusi. Tradisi kebebasan berpikir atau kebebasan berpikir (berekspresi) mempengaruhi tumbuh kembangnya prinsip. Prinsip kebebasan berserikat (freedom of association) dan kebebasan







berkumpul (freedom of assembly) dalam dinamika kehidupan masyarakat demokratis yang dimaksud. Pak Ismail Sani mengatakan, "Pemilihan umum merupakan suatu hal yang pasti dan merupakan suatu sistem yang sangat penting bagi demokrasi." Pemilu yang bebas berarti warga negara menyampaikan keinginannya mengenai kebijakan politik dalam jangka waktu tertentu, artinya mempunyai kesempatan.

Negara dan masyarakat harus mengejar siapa yang harus menjalankan kebijakan tersebut. Dalam sistem hak pilih universal, kita harus menyadari bahwa demokrasi adalah satu-satunya sistem yang memberikan ruang bagi lahir dan tumbuhnya berbagai visi dan ideologi. Semua perkembangan tersebut mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang secara bebas, kecuali ideologinya merupakan ideologi yang dilarang oleh negara. Hal ini bertujuan untuk membungkam atau menghilangkan paham dan ideologi yang ada, bahkan yang bertentangan dengan nilai ideologi yang dianut negara. Tujuan akhirnya adalah menciptakan keadaan sejahtera sesuai rencana. Sebaliknya demokrasi sendiri menciptakan ruang yang berguna dan efektif bagi terwujudnya prinsip-prinsip kerakyatan, oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Artinya, pimpinan lembaga negara dipilih oleh rakyat murni melalui pemilihan umum guna melindungi dan melestarikan hak seluruh warga negara. Hak ini berupa hak untuk memilih atau dipilih sebagai pejabat publik yang mewakili kepentingan rakyat di atas kepentingan individu atau kolektif. Oleh karena itu, jalan terwujudnya hak-hak sipil terletak pada sistem 4.444 pemilu yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga independen dan mandiri. Kondisi di atas dikatakan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang tertuang dalam buku Pengantar Teori Demokrasi karya Henry B. Mayo yang memberikan definisi demokrasi sebagai sistem politik. Sistem politik demokratis berarti sistem yang didasarkan pada prinsip kesetaraan politik dan terdiri dari anggota-anggota yang dipilih secara berkala dalam suasana yang menjamin kebebasan politik diawasi secara efektif. Ini adalah sistem di mana kebijakan publik ditentukan berdasarkan mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan secara berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Huda, 2014).

| No | Pertanyaan | Jawaban | Dokumentasi |
|----|---|---|---|
| 1. | Selamat siang kak, izin bertanya ya kak. Sebelumnya kakak sudah tau belum apasih demokrasi pancasila itu? | Siang adek, menurut informasi yang kakak baca Demokrasi Pancasila merupakan suatu konsep demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Pancasila. |  |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 2. | <p>Selamat siang kak, izin bertanya ya kak. Kenapa si negara Indonesia menerapkan Demokrasi Pancasila?</p> | <p>Siang, karena nilai-nilai Pancasila memegang peranan penting dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia.</p> |  |
| 3. | <p>Selamat siang kak, izin bertanya ya kak. Bagaimana pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Indonesia?</p> | <p>Siang juga, pelaksanaan Demokrasi Pancasila ya... berbentuk sistem pemerintahan yang berdasarkan pada asas-asas Pancasila, juga menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Pemerintahan di Indonesia juga dibangun dengan cara musyawarah dan pengambilan keputusan berdasarkan mufakat.</p> |  |
| 4. | <p>Selamat siang kak, izin bertanya ya kak. Nilai-nilai apa saja si yang terkandung didalam Demokrasi Pancasila?</p> | <p>Tentunya yang pertama nilai-nilai Pancasila, lalu nilai tanggung jawab dan pengakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus menghargai orang lain, dan masih banyak lagi</p> |  |
| 5. | <p>Selamat siang kak, izin bertanya ya kak. Demokrasi Pancasila itu bersumber dari apa si kak?</p> | <p>Menurut kakak, Demokrasi Pancasila bersumber dari kepribadian dan juga falsafah hidup Bangsa kita ini</p> |  |

| | | | |
|-----------|--|--|---|
| <p>6.</p> | <p>Selamat siang kak, izin bertanya ya kak. Bagaimana kita bisa tau kak bahwa suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokratis?</p> | <p>Siang juga adik, suatu Negara dapat dikatakan Negara demokratis dilihat dari cara pengambilan keputusannya, biasanya Negara demokrasi mengambil keputusan politik dengan cara musyawarah, itu salah satu ciri ciri yang paling mudah untuk kita mengetahui Negara itu bersifat demokrasi atau tidak</p> |  |
| <p>7.</p> | <p>Selamat siang kak, izin bertanya ya kak. Adakah dasar hukum yang mengatur tentang demokrasi?</p> | <p>Siang juga, jelas ada ya dik, yang pertama pastinya Pembukaan UUD 1945, lalu Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"</p> |  |
| <p>8.</p> | <p>Selamat siang kak, izin bertanya ya kak. Menurut kakak apa si yang membuat Demokrasi Pancasila disebut juga sebagai demokrasi konstitusional?</p> | <p>Menurut kakak karena Pancasila digunakan juga sebagai mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara maknanya disebut juga sebagai demokrasi konstitusional</p> |  |
| <p>9.</p> | <p>Selamat siang kak, izin bertanya ya kak. Mengapa Demokrasi Pancasila dianggap sebagai sistem politik yang paling tepat untuk Indonesia kak?</p> | <p>Siang juga, karena nilai-nilai yang terdapat dalam setiap sila Pancasila itu sesuai dengan ajaran demokrasi. Dan pula demokrasi ini paling sejalan dengan prinsip kebangsaan kita.</p> |  |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| <p>10.</p> | <p>Selamat siang kak, izin bertanya ya kak. Kita ini kan hidup di Negara demokrasi nah apa saja sih kak nilai-nilai yang diyakini masyarakat yang hidup dalam budaya demokrasi?</p> | <p>Siang juga, tentunya nilai-nilai demokrasi ya, seperti: toleransi, menghormati perbedaan pendapat, memahami dan menyadari keanekaragaman masyarakat, terbuka dalam komunikasi, menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia.</p> |  |
| <p>11.</p> | <p>Selamat siang kak, izin bertanya kak. Menurut kakak apa kekurangan sistem demokrasi Pancasila kak?</p> | <p>Siang juga dik, menurut kakak kekurangan dari system demokrasi pancasila yaitu tidak semua orang memahami makna demkorasi itu sendiri, itu yang menjadi permasalahan sampai saat ini.</p> |  |
| <p>12.</p> | <p>Selamat siang kak, izin bertanya ya kak. Menurut kakak nih Apa saja sih penerapan demokrasi di lingkungan masyarakat?</p> | <p>Siang juga, menurut saya penerapan demokrasi di lingkungan masyarakat itu ya... Selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan, bersama-sama menjaga kedamaian di masyarakat, dan yang paling penting tuh saling toleransi.</p> |  |
| <p>13.</p> | <p>Selamat siang kakak, izin bertanya ya kak. Apa Kelebihan Demokrasi Pancasila dibandingkan dengan yang lain?</p> | <p>Siang juga, menurut yang kakak baca yaa, kelebihanannya itu yang pertama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Terusb yang kedua ada penghargaan tinggi terhadap hak asasi manusia. Dan juga ada penghargaan terhadap hak-hak masyarakat minoritas.</p> |  |
| <p>14.</p> | <p>Selamat siang kak, izin bertanya ya kak. Apa saja tantangan terbesar demokrasi Indonesia ya kak?</p> | <p>Siang juga, menurut yang kakak baca tantangan terbesarnya itu ada 3 yaitu, yang pertama politik identitas, yang kedua misinformasi, misinformasi yang terkait dengan hoaks, yang ketiga adalah tentang hate speech, ujaran-ujaran kebencian terutama yang terkait dengan politik identitas.</p> |  |
| <p>15.</p> | <p>Selamat siang kak, izin bertanya ya kak. Menurut kakak nih Giimana sih seharusnya demokrasi yang dijalankan secara ideal?</p> | <p>Siang juga dik, menurut kakak agar demokrasi itu di jalankan secara ideal seharusnya menjadi acuan kehidupan kebangsaan di level manapun, baik dalam tingkat masyarakat maupun pemerintah.</p> |  |

KESIMPULAN

Demokrasi yang lahir di bawah kedaulatan rakyat yang absolut, jelas telah mengalami transformasi dan perubahan. Apalagi mereka sudah terbiasa dengan budaya masyarakat di mana mereka tinggal. Tipologi demokrasi yang beragam menunjukkan bahwa muncul pola-pola baru dari teori dasar demokrasi. Belakangan, Indonesia mengadopsi budaya itu di bawah kedaulatan nasional. Awalnya direncanakan transisi ke demokrasi lain, yang kemudian disebut demokrasi Pancasila. Menyelesaikan konflik secara damai dan sukarela dengan berpegang pada prinsip humanisme, menjaga keadilan dalam keragaman sosial, mempraktikkan kolektivisme, dan meminimalkan penggunaan kekerasan. Sebagai contoh realisasi praktis demokrasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila juga banyak menghadapi hambatan dan tantangan. Beberapa orang mencoba melakukannya, dan beberapa orang menolak. Namun apapun kenyataannya, patut diakui bahwa demokrasi Pancasila adalah sebuah kompromi yang harus didekati dengan hati-hati. Ini merupakan pilihan yang mengintegrasikan latar belakang agama, suku, dan budaya masyarakat Indonesia. Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan, keadilan dan kebenaran. Demokrasi berakar pada karakter dan pola hidup masyarakat Indonesia yang dilandasi oleh rasa kekeluargaan, gotong royong, dan persatuan untuk Indonesia yang adil dan makmur. Demokrasi Pancasila berarti rakyat adalah subjek demokrasi dan setiap warga negara berhak berpartisipasi aktif sebagai perwujudan dan penentu keinginannya sendiri. Keinginan masyarakat disampaikan melalui lembaga perwakilan yang ada seperti pemilihan umum. Hakikat demokrasi Pancasila adalah sila keempat: demokrasi yang berpedoman pada kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dikendalikan oleh dua nilai, yaitu kebijaksanaan dan kearifan. Pada dasarnya suatu negara dikatakan demokratis jika warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dalam pemerintahannya, mempunyai kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan menerima pendapatan yang adil melalui pendapatan yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Gandamana, A. (n.d.). *Memaknai Demokrasi Pancasila*.
- Haifarashin, R., & Anggraeni Dewi, D. (n.d.). *Pengimplementasian Sistem Demokrasi Pancasila dalam Organisasi Kepemudaan Karang Taruna*.
- Kaban, R. (2003). *Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara*.
- Pancasila, D., Bhineka, D., Ika, T., Heterogenitas, S., & Tjarsono, I. (n.d.). *Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas (Idjang)*.
- Yunus, N. R. (2015). Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal*, 2(2), 156–166. <https://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2815>